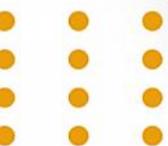




INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN GARUT



2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN GARUT
BPS - STATISTICS OF GARUT REGENCY**



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN GARUT



2023



Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Garut 2023

Nomor Publikasi : 32050.2348
Katalog BPS : 4102004.3205
ISSN : 2830-1323
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xviii + 59 halaman

NASKAH :

Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, BPS Kabupaten Garut

PENYUNTING :

Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, BPS Kabupaten Garut

GAMBAR KULIT :

Tim IPDS, BPS Kabupaten Garut

DITERBITKAN OLEH:

BPS Kabupaten Garut

Dilarang Mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik (UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 43 huruf b)

<https://parutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN GARUT 2023**

Pengarah : Dody Gunawan Yusuf, S.Si

Editor : Yudi Surya Lesmana, S.Si

Penulis : Aceng Sudiwana, SM

Pengolah Data/
Penyiapan Draft : Hendra Sukatriyana, SE

<https://garutkab.bps.go.id>

<https://parutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nyalah publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Garut Tahun 2023 ini bisa diterbitkan.

Publikasi ini berisi indikator-indikator kesejahteraan rakyat di Kabupaten Garut yang mencakup bidang Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan, dan Sosial.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan publikasi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharap kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan publikasi ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga publikasi ini dapat diselesaikan. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Garut, Oktober 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Garut,



Dody Gunawan Yusuf, S.SI

<https://parutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	13
ISTILAH TEKNIS	xv
1 PENDAHULUAN	1
2 KEPENDUDUKAN	9
3 KESEHATAN.....	19
4 PENDIDIKAN	25
5 KETENAGAKERJAAN.....	37
6 TARAF DAN POLA KONSUMSI.....	41
7 PERUMAHAN	43
8 SOSIAL LAINNYA	47

<https://parutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR TABEL

Halaman

KEPENDUDUKAN

Tabel 2.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2010-2022	10
Tabel 2.2 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Garut, 2011-2022	14
Tabel 2.3 Persentase Perbandingan perempuan berumur 15-49 tahun menurut karakteristik dan status penggunaan alat/cara KB Tahun 2020-2022	17

KESEHATAN

Tabel 3.1 Persentase Anak Usia 0-23 Bulan yang Pernah Disusui dan Rata-rata Lama Disusui di Kabupaten Garut, Tahun 2022	22
Tabel 3.2 Persentase Anak Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Garut, 2020 dan 2022	23

PENDIDIKAN

Tabel 4.1	Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2020 dan 2022	27
Tabel 4.2	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2020 dan 2022	31
Tabel 4.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2020 dan 2022	33
Tabel 4.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Berumur 7-18 Tahun Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, Tahun 2018 dan 2022	34

KETENAGAKERJAAN

Tabel 5.1	Penduduk Menurut Angkatan Kerja dan TPAK, TPT Keadaan Tahun 2021 dan 2022	
-----------	--	--

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Tabel 6.1	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Garut, Tahun 2022	42
-----------	--	----

PERUMAHANAN

Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Garut Tahun 2022	48
---	----

SOSIAL LAINNYA

Tabel 8.1 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Garut, 2020 – 2022	49
---	----

<https://parutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR GRAFIK

Halaman

KEPENDUDUKAN

Grafik 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Garut Tahun 2022 11

Grafik 2.2 Perkembangan Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Garut
Periode 2011-2022 (Jiwa/Km2) 12

KESEHATAN

Grafik 3.1 Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Garut Tahun 2011-
2022 20

Grafik 3.2 Perbandingan persentase Penolong Kelahiran Balita di Kabupaten
Garut, Tahun 2020 dan Tahun 2022 **Error! Bookmark not defined.**

PENDIDIKAN

Grafik 4.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) (tahun) di Kabupaten
Garut dan Provinsi Jawa Barat, 2015-2022 29

Grafik 4.2 Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) (tahun) di Kabupaten Garut
dan Provinsi Jawa Barat, 2015-2022 30

<https://garutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

ISTILAH TEKNIS

Air Minum Bersih	Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (septic tank) > 10 meter.
Angka Beban Tanggungan	Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.
Angka Harapan Hidup	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
Angka Kesakitan	Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.
Indeks Gini	Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.
Kepadatan Penduduk	Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi.
Lapangan Usaha	Bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Kegiatan ini mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam satu digit.
Pekerja Tidak Dibayar	seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tanggatanpa mendapat gaji

Perjalanan	Melakukan perjalanan pergi pulang (PP) sejauh minimal 100 Kilometer dan tidak dalam rangka mencari nafkah dan tidak dilakukan secara rutin
Perkotaan	Karakteristik sosial ekonomi dari wilayah administratif terkecil. Wilayah ini dikatakan sebagai perkotaan jika memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, lapangan kegiatan ekonomi utama, fasilitas-fasilitas perkotaan (jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya). Secara operasional penentuan daerah perkotaan dibuat dengan sistim skoring tertentu. Prosedur penentuan daerah perkotaan berlaku sejak tahun 1980 dan masih berlaku hingga saat ini.
Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)	Orang yang mempraktekkan salah satu metode kontrasepsi.
Rasio Jenis Kelamin	Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di satu daerah pada waktu tertentu.
Rata-Rata Lama Sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.
Tamat Sekolah	Menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkkan tanda tamat ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase pengangguran terhadap angkatan kerja
Tingkat Pertumbuhan Penduduk	Angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase.

<https://garutkab.bps.go.id>

<https://parutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I PENDAHULUAN

Pada era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan , Revolusi Data, Big Data dan Nawacita seperti sekarang ini, informasi tentang capaian pembangunan merupakan sumber data utama bagi para pemangku kebijakan dalam merencanakan pembangunan nasional.

Peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat adalah tujuan utama pembangunan suatu daerah yang berkesinambungan. Tujuan tersebut dapat tercapai secara maksimal jika didukung dengan landasan yang kuat. Dukungan informasi dan data yang menggambarkan hal-hal yang benar tentang fenomena yang sedang terjadi serta disajikan tepat pada waktunya sangat penting, agar pembangunan yang dilaksanakan dapat terarah dan tepat sasaran

Salah satu informasi yang diperlukan dan terkait dengan pembangunan masyarakat adalah data statistik yang menggambarkan tentang kondisi kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan data statistik yang menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat di suatu daerah sangat diperlukan untuk mengarahkan perencanaan pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat guna, dan tepat sasaran. Indikator sosial atau Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) di Kabupaten Garut, secara khusus menyajikan kumpulan data statistik yang diharapkan mampu memberikan gambaran sampai sejauh mana perkembangan kesejahteraan penduduk yang telah dicapai, sebagai hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Isi Inkesra ini masih bersifat makro mengingat sangat luasnya dimensi cakupan kesejahteraan. Namun demikian, buku ini diharapkan banyak membantu dalam analisis sosial ekonomi kesejahteraan penduduk baik untuk kepentingan perencanaan pembangunan maupun untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan dengan berbagai intervensinya guna meningkatkan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Garut.

1.1 Ruang Lingkup

Kesejahteraan rakyat mengandung makna kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin seluruh rakyat yang berisikan unsur kualitas kehidupan beragama, tingkat pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani serta pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan material masyarakat umumnya. Sedemikian luasnya pengertian kesejahteraan sehingga data statistik ekonomi konvensional seperti pendapatan per kapita masih belum memadai untuk menggambarkan kesejahteraan yang dimaksud.

Pada pengertian yang luas, tidak mungkin untuk menyajikan data statistik secara komprehensif yang mampu mengukur tingkat kesejahteraan penduduk secara paripurna. Indikator yang disajikan pada publikasi ini hanya menyangkut segi-segi kesejahteraan yang dapat diukur (*measurable welfare*), dan statistik sosial merupakan komponen utama dalam penyusunan indikator kesejahteraan rakyat.

1.2 Sistematika

Inkesra Kabupaten Garut Tahun 2023 ini terdiri dari 7 kelompok sektoral yaitu : Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan serta Sosial lainnya yang digambarkan dalam tabel dan gambar/grafik beserta uraiannya yang disajikan secara terpisah dan dalam bab masing-masing.

1.3 Sumber Data

Sumber data Inkesra Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah hasil Sensus Penduduk 2020, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2021 dan 2022 serta Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2023. Sumber data tersebut bersifat primer, karena dikumpulkan secara langsung dan diolah oleh BPS.

1.4 Konsep dan Definisi

1.4.1 Rumah tangga dan Anggota Rumah tangga

Rumah tangga dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus.

- 1) **Rumah tangga biasa** adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama satu dapur. Yang dimaksud dengan makan satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama menjadi satu.
- 2) **Rumah tangga khusus**, yaitu orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih tidak dicakup dalam Susenas.

Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih dianggap bukan sebagai anggota rumah tangga. Orang yang telah tinggal di suatu rumah tangga 6 bulan atau lebih atau yang telah tinggal di suatu rumah tangga kurang dari 6 bulan, tetapi berniat menetap di rumah tangga tersebut dianggap sebagai anggota rumah tangga.

Kepala rumah tangga adalah seorang dari sekelompok anggota yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di dalam rumah tangga tersebut.

1.4.2 Pendidikan

Sekolah adalah sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.

Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah sekolah, termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih bersekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.

Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah, atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak sekolah lagi.

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan) adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki seseorang yang masih sekolah.

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari seluruh penduduk dari berbagai kelompok umur tertentu (7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah.

Angka Putus Sekolah adalah proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

1.4.3 Kesehatan

Sakit adalah menderita banyak penyakit menahun (kronis) atau gangguan kesehatan yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu. Walaupun

seseorang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi bila tidak terganggu kegiatannya sehari-hari maka ia dianggap tidak sakit.

Imunisasi adalah memasukkan kuman penyakit yang sudah dimatikan ke dalam tubuh anak balita dengan cara suntik atau minum dengan maksud agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu pada tubuh.

1.4.4 Ketenagakerjaan

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

(lihat pada "*An ILO Manual on Concepts and Methods*")

Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang "**baru**",

yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila "**tindakannya nyata**", seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan.

Setengah Penganggur (*underemployment*) adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah penganggur terdiri dari :

- **Setengah penganggur terpaksa** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- **Setengah penganggur sukarela** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*).

Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah jumlah jam kerja yang dilakukan seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu: **Berusaha sendiri, Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruhtidak dibayar, Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja bebas di pertanian, Pekerja bebas di non pertanian, Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga.**

1.4.5 Konsumsi Pengeluaran Rumah tangga

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran atau

konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan setahun yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

1.4.6 Perumahan

Luas lantai adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, jemuran, dan warung (sebatas atap).

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

<https://parutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB II KEPENDUDUKAN

Masalah penduduk yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Series data kependudukan yang baik dan otentik sangat diperlukan sekali untuk mengetahui apakah pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh lapisan masyarakat, terutama pembangunan yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Pemerintah telah membuat proyeksi penduduk terbaru berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020.

2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi di Jawa Barat dan terus menjadi perhatian pemerintah adalah jumlah penduduk Jawa Barat yang besar. Dalam hal jumlah penduduk, Jawa Barat adalah provinsi yang menduduki peringkat pertama di Indonesia dengan jumlah penduduk yang paling banyak (hampir 1/5 penduduk Indonesia). Sedangkan untuk Kabupaten Garut sendiri,

jumlah penduduknya menduduki peringkat ke-5 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Jumlah penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2020 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 tercatat sebanyak 2,58 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sekitar 0,16 juta jiwa dari jumlah penduduk pada waktu pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2010 yang sebesar 2,42 juta jiwa.

Dan jumlah penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2022 berdasarkan proyeksi tercatat 2,627 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,92 %. Laju pertumbuhan yang relatif melambat dari tahun ke tahun, hal ini menggambarkan bahwa program pemerintah yang berkaitan dengan pengendalian penduduk cukup berhasil.

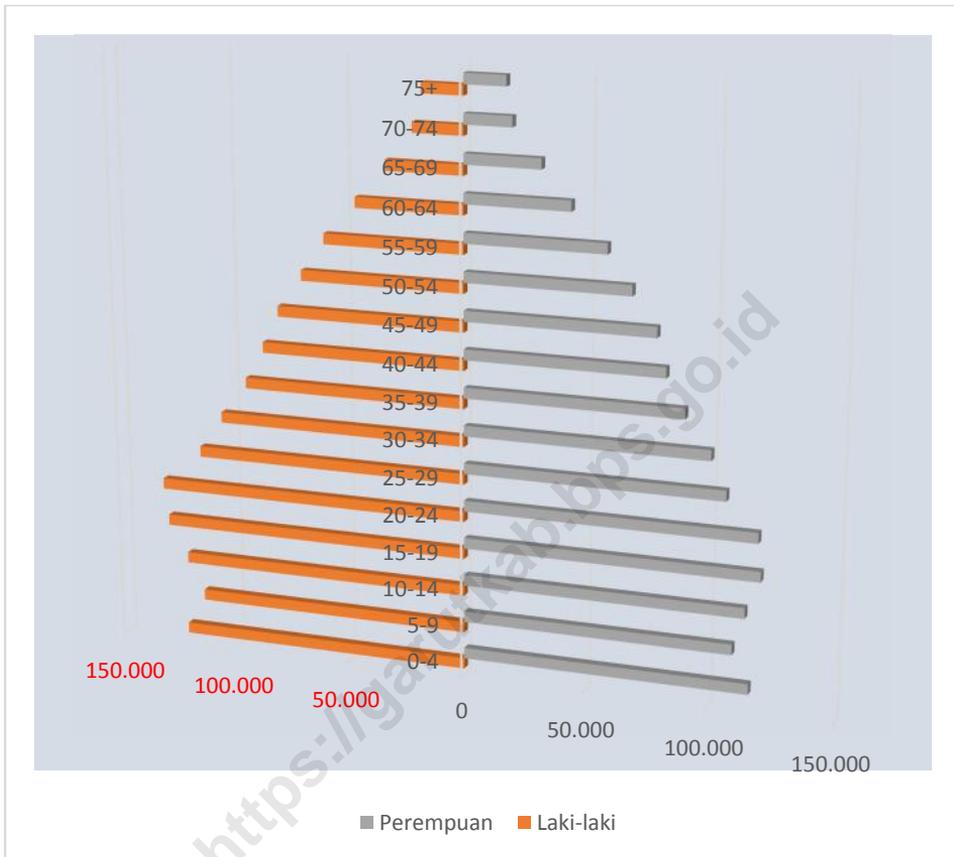
Tabel 2.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2020-2022

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)	Rasio Jenis Kelamin
2020	2.577.354	-	105,08
2021	2.613.529	1,40	104,96
2022	2.648.952	1,36	104,84

*)Hasil Sensus Penduduk 2020

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Garut pada tahun 2022 sebesar 104.84. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 104.84 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Garut lebih sedikit daripada jumlah penduduk laki-laki. Dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, semua Kabupaten/Kota memiliki rasio jenis kelamin di atas 100.

Grafik 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Garut Tahun 2022



Komposisi penduduk Kabupaten Garut memiliki tipe piramida Ekspansif, yang menggambarkan jumlah penduduk muda lebih besar daripada penduduk usia tua. Jumlah penduduk usia 5-9 tahun, baik laki-laki maupun perempuan lebih rendah dibandingkan dengan kelompok umur 0-4 tahun. Hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

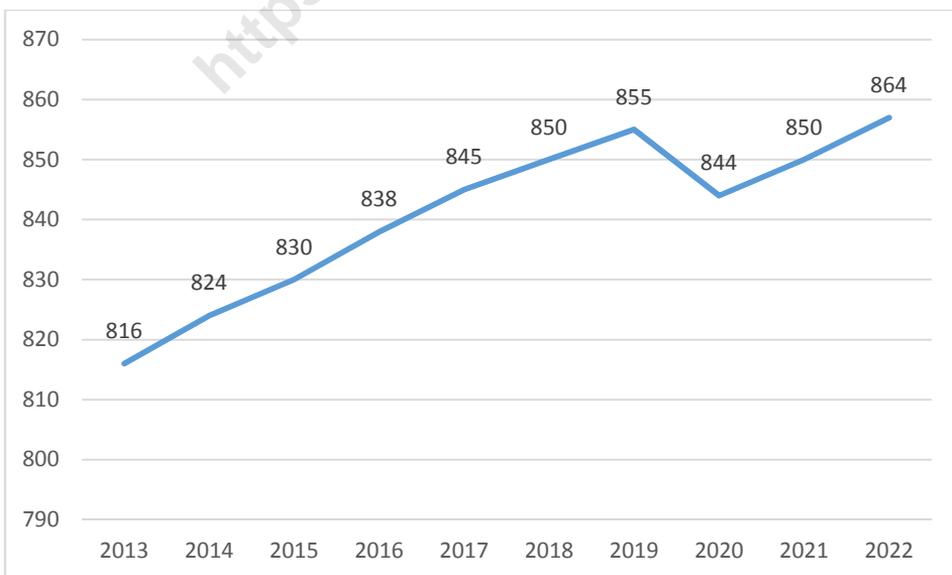
Kemudian pada *range* kelompok umur 25 sampai 29 tahun cenderung lebih sedikit. Hal tersebut menggambarkan bahwa migrasi pada kelompok penduduk tersebut cukup tinggi. Bentuk piramida penduduk yang cenderung semakin meruncing ke atas menunjukkan bahwa tingkat mortalitas pada usia

lansia di Kabupaten Garut masih terbilang tinggi. Pola antara kelompok penduduk laki-laki dan perempuan relatif hampir sama.

2.2 Kepadatan Penduduk

Kendati Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Garut akhir-akhir ini tampak relative terkendali, namun secara makro jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sementara di sisi lain secara agregat luas wilayah Kabupaten Garut tidak mengalami peningkatan. Hal tersebut secara langsung berdampak pada tingkat kepadatan penduduk (population density) yang secara otomatis terus menerus mengalami peningkatan. Indikator tingkat kepadatan penduduk ini dapat dijadikan suatu gambaran akan kemampuan suatu wilayah dalam memberikan daya dukung berupa sarana atau prasarana dan daya tampung terhadap penduduk.

Grafik 2.2 Perkembangan Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Garut Periode 2013-2022 (Jiwa/Km²)



Kabupaten Garut yang memiliki luas sekitar 3.065,19 km² dengan jumlah penduduk sebesar 2.648.952 jiwa di tahun 2022, maka tingkat kepadatan penduduk pada tahun tersebut tercatat sebesar 864 orang per km². Sementara jika dibandingkan dengan tahun 2013, dimana jumlah penduduk sebanyak 2.502.410 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 816 orang per km², maka selama kurun waktu sepuluh tahun telah terjadi peningkatan kepadatan penduduk sekitar 41 orang per km². Perkembangan indikator tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Garut selama periode 2013-2022 dapat dilihat dari Grafik 2.2.

2.3 Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada Tabel 2.2 yang angkanya semakin dapat dipertahankan terhadap beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin bertahan angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selama periode 2013-2022 angka beban ketergantungan di Kabupaten Garut setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Angka beban tanggungan di Garut pada tahun 2022 sebesar 47,356 persen. Artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban sekitar 47 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Tabel 2.2 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Garut, 2013-2022

kelompok umur (Umur)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0-14	31,91	31,91	31,9	30,86	30,52	30,19	29,97	27,1	27,1	27,099
15-64	62,65	62,64	62,63	63,16	63,29	63,39	63,43	67,86	67,86	67,862
65+	5,44	5,46	5,47	5,97	6,19	6,42	6,6	5,04	5,04	5,038
Angka beban ketergantungan	59,62	59,66	59,67	58,31	57,99	57,75	57,65	47,36	47,35	47,356

Rasio ketergantungan yang terus cenderung menurun belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif tapi tidak dapat dimanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Pada Tabel 2.2 juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Garut masih didominasi oleh penduduk usia produktif yang berdasarkan Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 ada sekitar 67,86 . Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Garut menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) semakin berkurang dari 5,44 persen pada tahun 2013 menjadi 5,038 persen pada tahun 2022. Menurunnya angka beban ketergantungan merupakan keberhasilan bagi pemerintah daerah dalam menata program pembangunan.

2.4 Rata-rata Usia Perkawinan Pertama

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

2.5 Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Menurut Prof. Dr. Fasli Jalal, perkembangan cakupan ber-KB dapat dikatakan lamban sehingga membuat laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Indonesia cukup tinggi. Lambatnya kenaikan angka cakupan ber-KB dipicu oleh beberapa faktor. Utamanya adalah masih tingginya kelompok yang tidak terlayani program KB (*unmet need*) dengan berbagai alasan dan kendala. Selain itu adalah semakin kecilnya akseptor KB yang memiliki KB dengan metode jangka panjang, sehingga angka *drop out* KB menjadi tinggi.

Berdasarkan hasil Susenas Maret Tahun 2022, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin yang menggunakan alat/cara KB mengalami sebesar 11.45 % dan yang sedang menggunakan sebesar 62,05 persen dan yang tidak pernah menggunakan 26.5 %.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunaannya.

Tabel 2.3 Persentase Perbandingan perempuan berumur 15-49 tahun menurut karakteristik dan status penggunaan alat/cara KB Tahun 2020-2022

Alat/Cara KB	2020	2022
Ya, Pernah	13,06	10.21
Ya, Sedang	58,23	59.74
Tidak	28,71	30.06

Tabel 2.3 memperlihatkan perbandingan perempuan yang berumur 15-49 tahun pada tahun 2020 dan tahun 2022, penggunaan Alat/Cara KB mengalami penurunan persentase sebanyak 2.85 persen pada yang pernah menggunakan KB tetapi ada kenaikan bagi yang sedang menggunakan yaitu sebesar 1.51 persen dari 58.23 menjadi sebesar 59.74 persen dan sisanya juga ada kenaikan sebesar 1.35 persen bagi yang tidak pernah menggunakan KB.

<https://parutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB III KESEHATAN

Salah satu indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah adalah tingkat kesehatan. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang serta meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah; meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

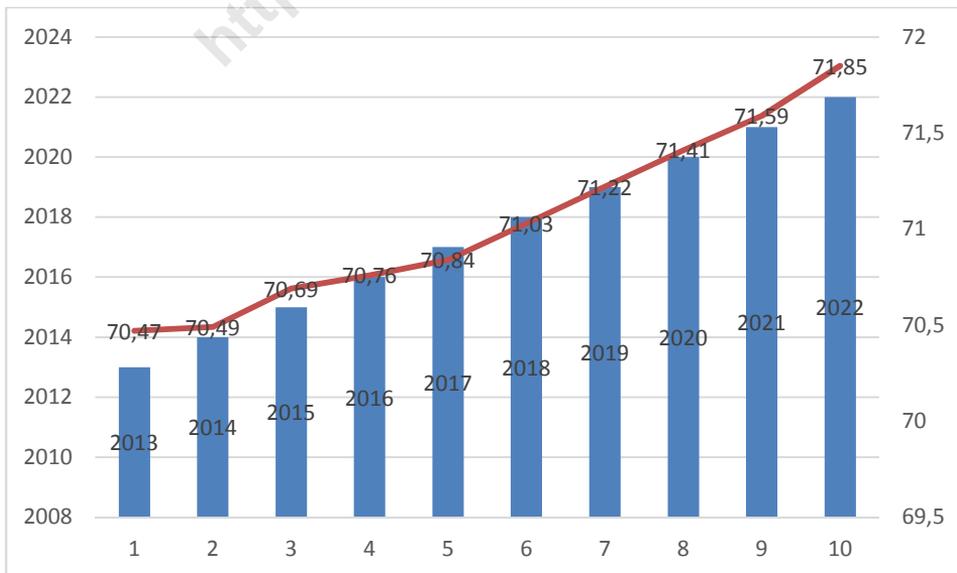
Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

3.1 Derajat dan Status Kesehatan

Tingkat kesehatan di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari besarnya usia harapan hidup penduduknya. Sumber data analisis untuk harapan hidup, semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat Garut telah diiringi dengan peningkatan Angka harapan hidup, tercatat dari Tahun 2013 angka harapan hidup yang tadinya sampai umur 70,47 tahun menjadi lebih panjang usia mencapai 71,85 tahun pada Tahun 2022. Peningkatan angka harapan hidup ini karena sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Bila kita bandingkan dengan nilai angka harapan hidup Provinsi Jawa Barat, maka dapat dilihat bahwa angka harapan hidup Kabupaten Garut masih dibawah rata-rata. Pada Tahun 2022, angka harapan hidup Provinsi Jawa Barat adalah 73,52 Tahun

Grafik 3.1 Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Garut Tahun 2013-2022



Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit). Hasil Susenas Tahun 2022 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Garut mencapai 18,41 persen, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 21,81 persen.

Lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah.

3.2 Tingkat Imunitas Balita

Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian dilanjutkan setelah sang anak lahir dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan kepada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, dan melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu pemerintah

menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti makanan/minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan keatas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

Tabel 3.1 Persentase Anak Usia 0-23 Bulan yang Pernah Disusui dan Rata-rata Lama Disusui di Kabupaten Garut, Tahun 2022

Rincian	Anak Usia 0-23 bulan yang Pernah Disusui (%)	Rata-rata Lama Disusui (bulan)
Garut	94,77	10,30

Hasil Susenas 2022 menunjukkan bahwa dari anak usia 0-23 bulan yang pernah disusui di Garut sebanyak 94,77 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar 4.1 persen untuk yang pernah disusui, dan untuk lama disusui juga terjadi penurunan 1,7 bulan dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa secara umum, jumlah anak usia 0-23 bulan yang pernah disusui di wilayah Garut terjadi penurunan, baik dari segi kuantitas anaknya ataupun dari segi kuantitas lama bulan menyusuinya.

Imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif di mana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang di sekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

Tabel 3.2 Persentase Anak Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Garut, 2020 dan 2022

Imunisasi	2020	2022
BCG	86,58	82,47
DPT	78,02	74,55
POLIO	87,67	77,85
CAMPAK	58,81	56,42
HEPATITIS B	76,47	76,7

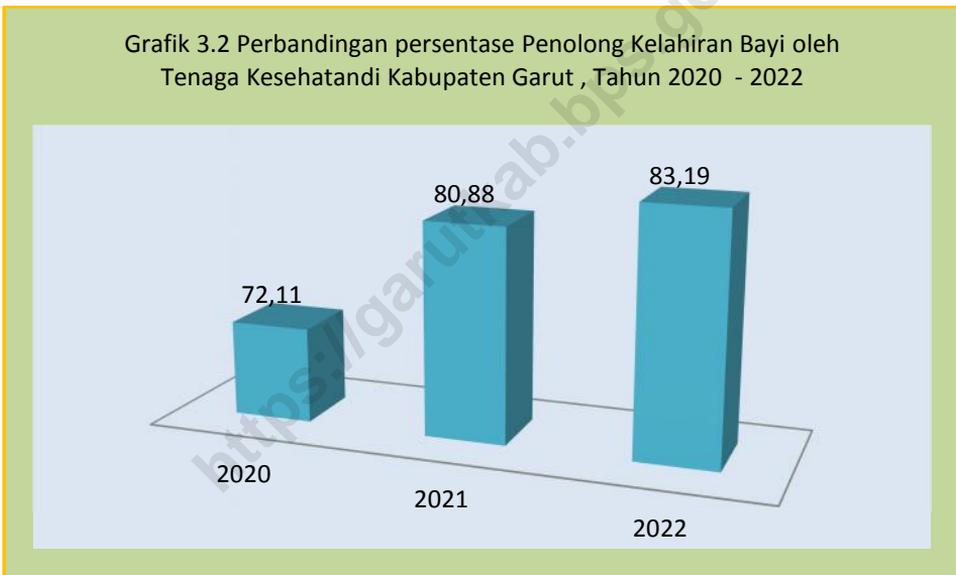
Dalam kurun waktu 2 tahun berdasarkan hasil Susenas 2020 dan 2022, mayoritas anak umur 0-59 bulan (Balita) yang mendapatkan imunisasi wajib secara umum mencapai kisaran di atas 70 persen. Namun, balita yang mendapatkan imunisasi CAMPAK masih di bawah 70 persen dan ada penurunan sekitar 2,39 persen dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 yaitu sekitar 58,81 persen.

3.3 Pemanfaatan Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan

bidan di desa-desa, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan yaitu meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

Dan terbukti ada peningkatan kesadaran dari masyarakat kabupaten Garut untuk menggunakan tenaga kesehatan dalam pertolongan persalinan sekitar 8,77 % dari tahun 2020 ke 2021 dan sekitar 2,31 % dari tahun 2021 ke 2022 , bisa kita lihat grafik 3.2



BAB IV PENDIDIKAN

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

4.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Seseorang dikatakan melek huruf apabila orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin, huruf arab atau huruf lainnya dalam kegiatannya memerlukan kecakapan tersebut dan juga memungkinkannya untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan membaca dan menulis untuk pengembangan diri dan masyarakat. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Program pemberantasan buta huruf sebetulnya sudah berjalan sejak zaman kemerdekaan, namun dalam perjalanannya terjadi pasang surut, bahkan dalam sejarahnya negara Indonesia pernah memproklamkan bebas buta huruf. Tetapi karena tidak dipergunakan keterampilan menyebabkan banyak yang menjadi buta kembali. Program pemberantasan buta huruf mempunyai tujuan

untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin dan berhitung serta berketerampilan. Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan lain adalah menciptakan tenaga lokal yang potensial guna mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya. Bagi pendidikan persekolahan, diharapkan akan mampu menekan angka putus sekolah di pendidikan persekolahan.

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) Garut bila dibandingkan dengan Tahun 2020. AMH naik dari 98,68 persen menjadi 99,28 persen. Peningkatan AMH juga menunjukkan bahwa angka buta aksara masyarakat menurun dan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan, walaupun minimal hanya dapat membaca dan menulis. Hal ini juga dapat mencerminkan berhasilnya program pemberantasan buta aksara yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Tabel 4.1 Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2020 dan 2022

Jenis Kelamin	2020	2022
Laki-Laki	99,34	99,72
Perempuan	98,02	98,82
Laki-laki + Perempuan	98,68	99,28

Walaupun program pemberantasan buta aksara menunjukkan berhasil, program ini harus terus dilakukan karena di Kabupaten Garut masih ada sekitar 0,72 persen penduduknya yang buta huruf/aksara. Angka buta aksara masyarakat harus dapat terus ditekan dan semakin menurun tiap tahunnya. Keberhasilan yang telah dicapai telah menumbuhkan semangat dari pemerintah untuk terus memacu percepatan penurunan angka buta aksara dengan menggalang kerjasama dengan berbagai pihak, seperti dengan pemerintah

daerah, perguruan tinggi, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, dan swasta. Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat ini, pemerintah lebih optimis angka buta aksara akan terus mengalami penurunan.

Berdasarkan jenis kelamin, AMH penduduk laki-laki selama kurun waktu 2 tahun, mengalami kenaikan yaitu dari angka 99,34 persen di tahun 2020 menjadi 99,72 persen di tahun 2022. AMH penduduk perempuan pada tahun yang sama juga mengalami kenaikan dari 98,02 persen pada tahun 2020 menjadi 98,82 persen pada tahun 2022. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum AMH laki-laki lebih tinggi daripada AMH perempuan.

Pencapaian AMH tersebut sudah sangat baik, namun demikian, pemerintah tetap harus terus menggalakkan pemberantasan buta huruf di seluruh wilayah. Lebih khusus lagi, pemerintah harus lebih fokus terhadap usia muda, jangan sampai buta huruf baru di usia muda bermunculan dan akan menjadi beban pemerintah di masa mendatang.

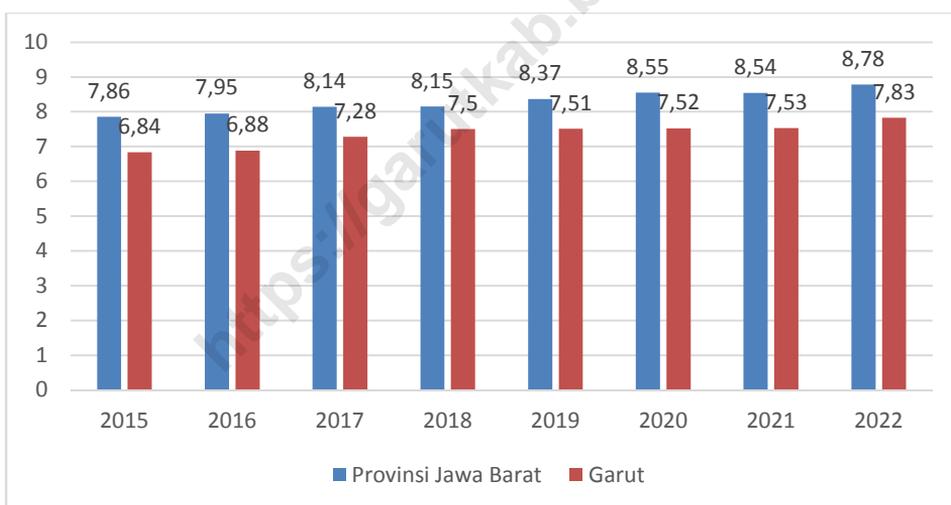
4.2 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menempuh berbagai upaya dengan meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar

jenjang pendidikan. Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, cara paling efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan dengan menyekolahkan kembali penduduk Indonesia yang telah berusia lanjut, tetapi mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah. Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Grafik 4.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) (tahun) di Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat, 2015-2022

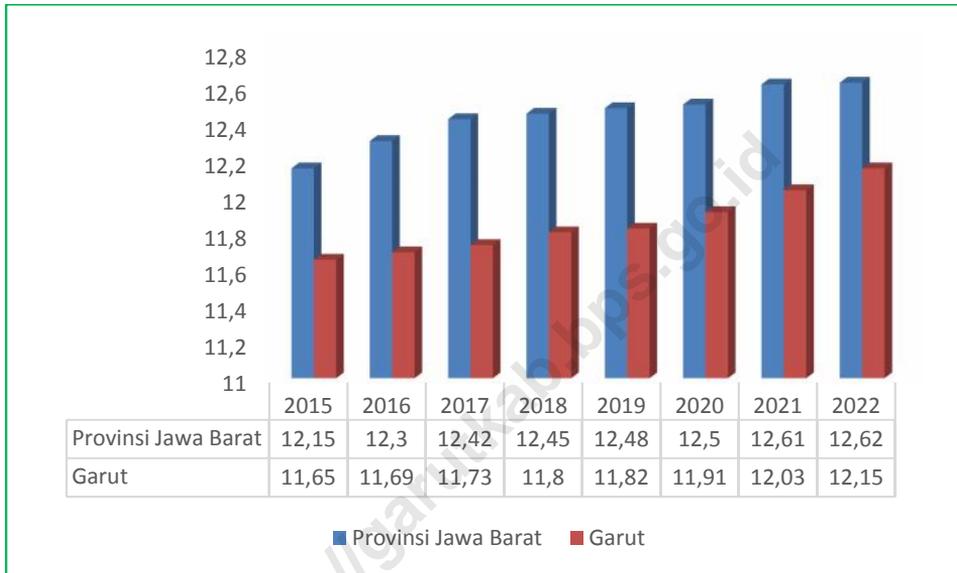


Secara umum rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Garut pada tahun 2022 mencapai 7,83 tahun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (7,53 tahun). Hal ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Garut ada peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 telah mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 7.83 atau SMP kelas 2.

Tetapi kalau dibandingkan Provinsi Jawa Barat rata-rata lama sekolah kabupaten garut dari mulai tahun 2015 sampai tahun 2022 selalu lebih rendah,

artinya angka rata-rata lama sekolah di provinsi Jawa Barat masih lebih baik dari pada angka rata-rata lam sekolah di Kabupaten Garut.

Grafik 4.2 Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) (tahun) di Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat, 2015-2022



Angka Harapan Lama Sekolah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan secara berturut-turut 11,65 tahun ;11,69 tahun 2016, 11,73 Tahun 2017; 11,80 tahun 2018; 11,82 tahun 2019; 11,91 tahun 2020; 12.03 tahun 2021 dan 12,15 tahun 2022. Dari mulai tahun 2015 sampai tahun 2022 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Garut masih di bawah rata-rata harapan lama sekolah provinsi.

4.3 Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/ keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang

luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2020 dan 2022

Ijazah yang Ditamatkan	2020			2022		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Tidak Mempunyai Ijazah	10,89	14,77	12,83	6,49	7,69	7,08
SD/Sederajat	37,7	38,76	38,23	37,9	42,96	40,37
SMP/Sederajat	24,65	23,53	24,09	26,96	25,86	26,42
SMA/Sederajat keatas	26,74	22,94	24,85	28,65	23,48	26,13

Pada tahun 2022, secara umum penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Garut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2020, Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan SMP Tahun 2020 mencapai 24,09 persen, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 26,42 persen, Adapun persentase penduduk dengan ijazah yang ditamatkannya pada tingkat SD/MI/SDLB/Paket A juga mengalami kenaikan yaitu 38,23 persen pada Tahun 2020 menjadi 40,37 persen pada tahun 2022.

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan yang telah ditamatkan, secara umum persentase penduduk yang tidak mempunyai ijazah pendidikan

mengalami penurunan dari 12,83 persen pada Tahun 2020 menjadi 7,08 persen di tahun 2022. Sementara untuk pendidikan tamatan SLTA ke atas juga sama mengalami kenaikan, yaitu sebesar 24,85 persen di tahun 2020, menjadi 26,13 persen di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa telah semakin naiknya kesadaran masyarakat pendidikan itu sangat penting, sehingga masyarakat aktif berpartisipasi dalam pendidikan, diharapkan kesadaran masyarakat ini terus meningkat sehingga mampu menurunkan jumlah masyarakat yang tidak bersekolah, Dengan kata lain, masyarakat yang menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia,

Pada Tabel 4.3 di atas, tahun 2022 tercatat bahwa tingkat pendidikan penduduk laki-laki tidak jauh dari perempuan, Hal ini terlihat pada tingkat pendidikan SD ke bawah (termasuk belum tamat SD dan tidak/belum bersekolah), dimana persentase laki-laki mencapai 37,9 persen sedangkan perempuan persentasenya lebih tinggi yaitu 42,96 persen.

Jika kita lihat secara garis besar dapat kita lihat bahwa semakin rendah tingkat pendidikan, persentase perempuan selalu lebih rendah dari laki-laki tetapi itu pun hanya tinggal selisih 0,91 persen, tetapi hanya untuk SD/Sederajat ke bawah persentase laki-laki menjadi lebih rendah dibandingkan perempuan, Hal ini merupakan warisan era masa lalu yang berkaitan dengan kultur budaya kita yang lebih mengedepankan laki-laki dibandingkan perempuan, Dan tentu saja ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk terus mengkampanyekan pentingnya pendidikan baik laki-laki maupun perempuan.

4.4 Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap

khususnya indikator APS dan APM selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Berdasarkan Susenas tahun 2022, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok umur baik itu 13-15 tahun dan 16-18 tahun mengalami peningkatan. Secara umum APS penduduk berumur 13-15 tahun sebesar 95,29 persen pada tahun 2022 atau mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang sebesar 94,46 persen, sedangkan penduduk berumur 16-18 tahun sebesar 67,62 persen atau mengalami kenaikan dari tahun 2020 yang sebesar 61,47 persen. Sementara APS penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun mengalami penurunan dari 99,94 persen tahun 2020 menjadi 99,49 persen di tahun 2022. Peningkatan APS pada beberapa kelompok umur dapat menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan semakin meluas dan mudah diakses oleh masyarakat, begitupun sebaliknya.

Tabel 4.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut , 2020 dan 2022

Kelompok Umur/Jenis Kelamin	2020	2022
7-12 tahun		
Laki-laki	99.88	97,92
Perempuan	100.00	99.02
L+P	99.94	99.49
13-15 tahun	-	
Laki-laki	92.34	99,2
Perempuan	96.43	98,66
L+P	94.46	95,29
16-18 tahun	-	
Laki-laki	70.57	63,95
Perempuan	50.99	71,12
L+P	61.47	67,62

Jika dilihat menurut jenis kelamin, APS penduduk perempuan tahun 2022 terlihat lebih besar bila dibandingkan penduduk laki-laki begitu pula pada tahun 2020 untuk usia 7-12 tahun lebih besar perempuan dibanding laki-laki. Tetapi untuk Usia 13-15 tahun yaitu usia SLTP perempuan lebih dominan dari pada laki-laki baik tahun 2020 dan sebaliknya di tahun 2022 justru lelaki lebih besar yaitu mencapai 99,2 persen. Dan ini berbanding terbalik untuk usia SLTA justru laki-laki lebih dominan dari pada perempuan baik itu pada tahun 2020 dan baru tahun 2022 sebaliknya perempuan yang lebih dominan dari pada laki-laki

Sama halnya dengan APS, Angka Partipasi Murni (APM) pada tahun 2022 justru mengalami peningkatan pada hampir semua jenjang pendidikan hanya jenjang SD/Sederajat saja yang mengalami penurunan. Secara umum APM SD sebesar 97,18 persen mengalami penurunan dari tahun 2020 yang sebesar 99,07 persen. Tetapi untuk APM SMP mengalami kenaikan dari 83,09 persen di tahun 2020 menjadi 83,28 persen di tahun 2022. Begitu pula APM SMA mengalami kenaikan dari 51,91 persen di tahun 2020 menjadi 52,21 persen di tahun 2022. Peningkatan APM menunjukkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka.

Tabel 4.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Berumur 7-18 Tahun Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, Tahun 2020 dan 2022

Kelompok Umur/ Jenis Kelamin		2020	2022
SD/ sederajat			
	Laki-laki	99.38	96,02
	Perempuan	98.73	98,24
	L+P	99.07	97,18
SMP/ sederajat			
	Laki-laki	80.84	79,7
	Perempuan	85.20	87,18
	L+P	83.09	83,28
SMA/ sederajat			
	Laki-laki	60.03	49
	Perempuan	42.56	55,26
	L+P	51.91	52,21

Jika dilihat menurut jenis kelamin, pada tahun 2022 APM SD laki-laki terlihat lebih rendah bila dibandingkan APM SD perempuan. APM SD penduduk laki-laki sebesar 97,02 persen atau berbeda sedikit dengan perempuan yang sebesar 98,24 persen. APM SLTP pada tahun 2022 untuk penduduk perempuan lebih besar perempuan dari laki-laki yaitu sebesar 87,18 persen untuk perempuan sedangkan laki-laki hanya mencapai 79,7 dan berbanding terbalik untuk tahun 2020 lebih tinggi laki-laki dari pada perempuan untuk APM SLTA penduduk laki-laki lebih mendominasi dari pada penduduk perempuan di tahun 2020 tercatat pada tahun 2020 sebesar 60,03 persen laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan sebesar 42,56 persen.

Dan begitu pula untuk tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 untuk laki-laki hanya mencapai 49 persen tetapi perempuannya lebih tinggi yaitu 55,26 persen tetapi kalau melihat total antara tahun 2020 dengan tahun 2022 untuk APM SLTA ada peningkatan sebesar 0,3 persen untuk APM SLTP ada peningkatan 0,19 persen serta untuk APM SD ada penurunan sekitar -1,89 persen.

Dari gambaran pembahasan APS dan APM di atas masih menunjukkan adanya kesenjangan. Kesenjangan ini diakibatkan oleh layanan pendidikan yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, di samping faktor ekonomi fasilitas layanan pendidikan yang masih belum merata dan sangat terbatas turut menghambat partisipasi pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan akses pendidikan yang merata dan mudah dijangkau masyarakat serta memberikan penyelenggaraan pendidikan yang layak dari segala sisi di seluruh wilayah mulai dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur.

<https://parutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB V KETENAGAKERJAAN

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan wilayah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2022 kondisi Agustus. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/gaji/pendapatan bersih.

5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Penduduk Angkatan Kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Garut Tahun 2022 sebanyak 1,93 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja mencapai 0,6 juta orang.

**Tabel 5.1 Penduduk menurut Angkatan Kerja dan TPAK,TPT
Keadaan Tahun 2021 dan 2022**

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021 Juta Orang	Agustus 2022 Juta Orang
Penduduk Usia Kerja	1,91	1,93
Angkatan Kerja	1,2	1,33
Bekerja	1,1	1,23
Pengangguran	0,1	0,1
Bukan Angkatan Kerja	0,71	0,6
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,76	68,84
Laki-laki	81,15	84,43
Perempuan	44,28	53,19
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,68	7,6

Jika dilihat dari Tabel 5.1 Jumlah partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2022 masih didominasi oleh Laki-laki yang mencapai 84,43 juta orang dan perempuan yaitu mencapai 53,19 juta orang dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2022 ada peningkatan sekitar 5,92 juta orang dari tahun 2021 yang telah mencapai 62,76 juta orang, dan pada tahun 2021 juga untuk ini masih didominasi oleh kaum laki-laki yang mencapai 81,15 juta orang dan pihak perempuannya hany berjumlah 44,28 juta orang.

Dan untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2022 turun 1,08 juta orang dari tahun 2021 yang mencapai 8,68 juta orang dan pada tahun 2022 hany tinggal 7,6 juta orang.

Tetapi untuk bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan tercatat pada tahun 2022 yaitu tersisa 0,6 juta orang dari tahun sebelumnya 2021 yang mencapai 0,71 juta orang.

Seperti halnya TPAK, jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2021 mencapai 1,91 juta orang dan ada peningkatan pada tahun 2022 yaitu mencapai 1,93 juta orang dan dari jumlah tersebut jumlah angkatan kerja yang bekerja juga ada peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 0,13 juta orang.

<https://garut.kab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB VI TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila juta orangtase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan juta orangtase pengeluaran untuk non makanan.

6.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 6.1 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Garut, Pada Tahun 2022

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Total Rata-rata 20 persen Pengeluaran
	40 persen terbawah	40 persen Tengah	Teratas	
1. Padi-padian	72.558	77.944	83.506	76.899
2. Umbi-umbian	3.646	6.288	10.736	6.119
3. Ikan/udang/cumi/kerang	16.582	28.909	51.286	28.446
4. Daging	17.191	34.486	52.987	31.260
5. Telur dan susu	15.248	25.418	49.939	26.246
6. Sayur-sayuran	18.676	30.528	48.824	29.439
7. Kacang-kacangan	9.207	12.198	19.019	12.364
8. Buah-buahan	8.378	18.538	45.029	19.763
9. Minyak dan kelapa	10.061	17.025	29.933	16.816
10. Bahan minuman	15.028	21.696	29.640	20.614
11. Bumbu-bumbuan	6.793	11.879	20.252	11.516
12. Konsumsi lainnya	8.163	14.417	24.327	13.894
13. Makanan dan Minuman Jadi	73.579	144.026	261.028	139.203
14. Rokok dan Tembakau	52.559	92.052	159.063	89.632
Jumlah Makanan	327.670	535.405	885.570	522.212
15. Perumahan dan fasilitas rumah tangga	77.456	151.147	373.912	166.153
16. Aneka barang dan jasa	45.454	85.775	204.645	93.383
17. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	10.397	23.853	55.144	24.718
18. Barang tahan lama	2.082	8.614	86.959	21.650
19. Pajak, pungutan, dan asuransi	10.498	17.832	47.828	20.889
20. Keperluan pesta dan upacara/kenduri	598	3.830	36.552	9.073
Jumlah Bukan Makanan	146.486	291.052	805.039	335.866
Rata-Rata Pengeluaran	474.156	826.458	1.690.609	858.077

Tabel 6.1 di atas menyajikan data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan tahun 2022. Dari tabel tersebut terlihat bahwa selama tahun 2022, pengeluaran masih didominasi oleh kelompok pengeluaran teratas yaitu sebesar Rp. 885.570 dan untuk kelompok bukan makanan nya hanya Rp. 805.039. Dan kalau melihat secara Total rata-rata 20 persen pengeluaran untuk makanan masih yang teratas yaitu mencapai Rp.522.212 dan sisanya masih kelompok bukan makanan yang hany mencapai Rp.335.866.

BAB VII PERUMAHAN

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketenteraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen no.9 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang

semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

7.1 Fasilitas Rumah Tinggal

Selain kualitasnya, kenyamanan rumah tinggal juga ditentukan oleh kelengkapan fasilitasnya yang sesuai dengan standar kesehatan, Yang termasuk dalam fasilitas tersebut adalah tersedianya air minum dan sanitasi yang layak, serta adanya penerangan yang baik, air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga, ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan memasak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Sedemikian pentingnya ketersediaan fasilitas ini hingga menjadi salah satu target yang harus dipenuhi dalam tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals - MDGs). Target tersebut adalah menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak pada 2022.

Berdasarkan kriteria yang digunakan dalam MDGs tersebut, rumah tangga yang memiliki sumber air minum layak adalah rumah tangga yang air minumnya bersumber dari ledeng, air hujan atau dari pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak dari tempat pembuangan limbah (tangki septik) terdekat lebih dari 10 m, Dalam hal ini, menggunakan air kemasan

maupun isi ulang untuk minum tidak termasuk memiliki sumber air minum yang layak.

Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Garut Tahun 2022

Uraian		Juta orang
-1		-2
1	Sumber air utama untuk mandi/cuci/dll :	
	- Leding	3,55
	- Sumur Bor/Pompa	14,45
	- Sumur/Mata air terlindung	54,19
	- Sumur/Mata air tak terlindung	21,9
	- Lainnya	5,81
2	Fasilitas Tempat Buang Air Besar:	
	- Ada, digunakan hanya ART sendiri	76,78
	- Lainnya	23,22
3	Jenis Kloset yang digunakan :	
	- Leher Angsa	79,06
	- Lainnya	20,94
4	Tempat pembuangan air tinja :	
	- Tangki Septik/IPAL	44,43
	- Lainnya	55,57

Sumber : Susenas 2022 (diolah)

Catatan : 1) Fasilitas tempat BAB sendiri atau bersama, jenis kloset leher angsa dan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir kotoran

Pada Tabel 7.1 tampak bahwa juta orangtase rumah tangga yang menggunakan sumber air utama untuk mandi/cuci/dll yang terbesar pada tahun 2022 adalah dari Sumur/Mata air terlindung mencapai 54,19 juta orang, bila dilihat lagi dengan lebih mendetil terhadap sumber air yang digunakan maka terlihat bahwa di Kabupaten Garut 21,9 juta orang rumah tangganya menggunakan air dari sumur/mata air tak terlindung, Baik sumur terlindung maupun mata air terlindung apabila jarak keduanya dari tempat penampungan kotoran terdekat lebih dari 10 m, maka kedua sumber air ini cukup sehat untuk digunakan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://garutkab.bps.go.id>

BAB VIII SOSIAL LAINNYA

Aspek sosial lain seperti akses pada teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat, Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer, Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern, Semakin terjangkaunya harga telepon pintar dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang mereka inginkan,

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis, serta tingkat keamanan wilayahnya, Semakin besar masyarakat mendapatkan pelayanan kredit usaha semakin mempermudah masyarakat untuk meningkatkan aktivitas usahanya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kesehatan gratis menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Dengan pelayanan kesehatan gratis tersebut masyarakat dapat mengalihkan pendapatannya pada keperluan hidup lainnya guna meningkatkan kesejahteraannya.

Rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas dan bekerja. Semakin rendah tingkat kejahatan di suatu wilayah menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.

8.1 Akses Informasi dan Komunikasi

Perkembangan telepon seluler cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah, pesatnya perkembangan teknologi telepon seluler membuat telepon rumah semakin ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan telepon seluler, penggunaan telepon rumah yang mengharuskan seseorang berada di posisi tertentu yang terpasang jaringan telepon semakin ditinggalkan masyarakat karena dianggap kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunanya.

Di tahun 2022 penggunaan telepon seluler meningkat 2,92 juta orang dibandingkan Tahun 2020, dari 67,32 juta orang menjadi 70,24 juta orang, Kemudian apabila kita lihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki yang menggunakan telepon seluler selalu lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan pada setiap tahunnya, Pada Tahun 2020 penduduk laki-laki dibandingkan penduduk perempuan mengalami kenaikan dari 67,85 juta orang menjadi 71,72 di tahun 2022, tetapi untuk penduduk perempuan di tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2020, dimana pada tahun 2020 62,60 juta orang menjadi 55,97 juta orang untuk tahun 2022. Penggunaan telepon seluler meningkat karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana, lebih bersifat pribadi, dan tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain.

Gambaran diatas juga terlihat jelas di Tabel 8.1 dibawah ini , dimana untuk akses Internet pada tahun 2020 sampai 2022 terlihat ada kenaikan yang nyata untuk laki-laki dimana dari tahun 2020 yang mencapai 45,28 juta orang menjadi 52,15 juta orang di tahun 2022 ditahun 2022 dan untuk perempuan ada sedikit penurunan yaitu pada tahun 2020 pengguna Internet mencapai 42,81 juta orang tetapi pada tahun 2022 ada penurunan sebesar 1,23 juta orang dimana pada tahun 2022 akses internet perempuan menjadi tinggal 41,58 juta orang .

Tabel 8.1 Juta orangtase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Garut, 2020 – 2022

Alat Komunikasi	Laki-Laki	Perempuan	L+P
Telepon Seluler / Komputer			
2020	67,85	62,6	67,32
2022	71,72	55,97	70,24
Akses Internet			
2020	45,28	42,81	45,03
2022	52,15	41,58	51,16

DATA

MENCERDASKAN BANGSA
- Enlighten The Nation -



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN GARUT**

BPS - STATISTICS OF GARUT REGENCY

Jl. Pembangunan No. 222 Tarogong Kidul Garut 44151,
Jawa Barat, Indonesia Telp. (0262) 233273

Website : [http:// garutkab.bps.go.id](http://garutkab.bps.go.id) Email : bps3205@bps.go.id

ISSN 2830-1323



9 772830 132008